



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 109 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak Proyek Strategis Nasional bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK  
STRATEGIS NASIONAL.**

Pasal I . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 2 -

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119); dan
- b. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
2. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan, fasilitas fiskal, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemerintah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  6. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, atau koperasi.
  7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
  8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Provinsi adalah penyelenggara PTSP di provinsi.
  9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP di kabupaten/kota.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha, yang bersumber dari anggaran Pemerintah dan/atau non-anggaran Pemerintah.
- (2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Proyek . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 4 -

- (3) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
  - (4) Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - (5) Dalam rangka koordinasi Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat mengusulkan perubahan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
  - (6) Perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas setelah mendapatkan persetujuan Presiden.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

(3) Gubernur . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 5 -**

- (3) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    - a. tidak memungut; atau
    - b. mengenakan tarif 0% (nol persen), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional.
  - (4) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pungutan atau pengenaan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional.
4. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA  
LAPANGAN KERJA**

5. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24A**

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengutamakan penciptaan lapangan kerja secara luas dan intensif.

6. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 32 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 32**

- (1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

(2) Laporan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula laporan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku koordinator pembiayaan investasi non-anggaran Pemerintah.
  - (3) Dalam rangka pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dibantu oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
  - (4) Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dan pemangku kepentingan terkait lainnya wajib memberikan informasi secara langsung mengenai perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
  - (5) Penyampaian informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan dalam bentuk fisik dan/atau bentuk digital.
  - (6) Penyampaian informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
7. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal II**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

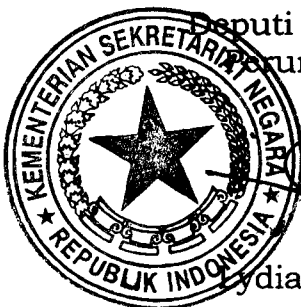
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 259

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



*[Signature]*  
Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 109 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN  
PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

**DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

**I. PROYEK**

| NO.                          | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL                                                           | LOKASI                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| A. Sektor Jalan dan Jembatan |                                                                                            |                                  |
| 1.                           | Jalan Tol Serang - Panimbang                                                               | Provinsi Banten                  |
| 2.                           | Jalan Tol Pandaan - Malang                                                                 | Provinsi Jawa Timur              |
| 3.                           | Jalan Tol Manado - Bitung                                                                  | Provinsi Sulawesi Utara          |
| 4.                           | Jalan Tol Balikpapan - Samarinda                                                           | Provinsi Kalimantan Timur        |
| 5.                           | Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera                               | Provinsi Sumatera Utara          |
| 6.                           | Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera                   | Provinsi Riau                    |
| 7.                           | Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera                      | Provinsi Sumatera Utara          |
| 8.                           | Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera                           | Provinsi Aceh                    |
| 9.                           | Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera                                     | Provinsi Aceh dan Sumatera Utara |
| 10.                          | Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Barat          |
| 11.                          | Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran - bagian dari Trans Sumatera                             | Provinsi Sumatera Utara          |
| 12.                          | Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe - bagian dari Trans Sumatera                                | Provinsi Aceh                    |

13. Jalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 2 -

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL                                                                      | LOKASI                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 13. | Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli - bagian dari Trans Sumatera                                            | Provinsi Aceh                                                     |
| 14. | Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera              | Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau                         |
| 15. | Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Utara                                           |
| 16. | Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera                          | Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan                      |
| 17. | Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera                                                 | Provinsi Jambi dan Riau                                           |
| 18. | Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera                                             | Provinsi Riau                                                     |
| 19. | Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat - bagian dari Trans Sumatera                           | Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara                         |
| 20. | Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera                                 | Provinsi Sumatera Selatan                                         |
| 21. | Jalan Tol Muara Enim - Lubuk Linggau - Lahat - bagian dari Trans Sumatera                             | Provinsi Sumatera Selatan                                         |
| 22. | Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera                               | Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu                            |
| 23. | Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung                                                             | Provinsi Sumatera Selatan                                         |
| 24. | Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan                                                                | Provinsi Jawa Barat                                               |
| 25. | Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang                                                   | Provinsi Jawa Barat                                               |
| 26. | Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran                                                          | Provinsi Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta dan Provinsi Banten |
| 27. | Jalan Tol Serpong - Cinere                                                                            | Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat                           |
| 28. | Jalan Tol Cinere - Jagorawi                                                                           | Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat                      |

29. Jalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL                                          | LOKASI                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 29. | Jalan Tol Cimanggis - Cibitung                                            | Provinsi Jawa Barat                                                 |
| 30. | Jalan Tol Cibitung - Cilincing                                            | Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat                        |
| 31. | Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu                                | Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat                        |
| 32. | Jalan Tol Serpong - Balaraja                                              | Provinsi Banten                                                     |
| 33. | Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta           | Provinsi DKI Jakarta                                                |
| 34. | Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta       | Provinsi DKI Jakarta                                                |
| 35. | Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta                                                |
| 36. | Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta                                                |
| 37. | Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta      | Provinsi DKI Jakarta                                                |
| 38. | Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta  | Provinsi DKI Jakarta                                                |
| 39. | Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo                                          | Provinsi Jawa Timur                                                 |
| 40. | Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi                                        | Provinsi Jawa Timur                                                 |
| 41. | Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar                               | Provinsi Jawa Timur                                                 |
| 42. | Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan                              | Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat                        |
| 43. | Jalan Tol Semarang - Demak                                                | Provinsi Jawa Tengah                                                |
| 44. | Jalan Tol Yogyakarta - Bawen                                              | Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah |
| 45. | Pembangunan <i>Fly Over</i> Dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong         | Provinsi Jawa Timur                                                 |
| 46. | Penambahan Lingkup Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri                   | Provinsi Jawa Timur                                                 |
| 47. | Penambahan Lingkup Jalan Tol Depok - Antasari                             | Provinsi Jawa Barat                                                 |

48. Penambahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

| NO.                 | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL                                  | LOKASI                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 48.                 | Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo      | Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta |
| 49.                 | Penambahan Lingkup Jalan Tol Bogor <i>Ring Road</i>               | Provinsi Jawa Barat                               |
| 50.                 | Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap                        | Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah      |
| 51.                 | Jalan Tol Semarang <i>Harbour</i>                                 | Provinsi Jawa Tengah                              |
| 52.                 | Jalan Tol Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar (Mamminasata) | Provinsi Sulawesi Selatan                         |
| 53.                 | Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban                                | Provinsi Jawa Barat                               |
| 54.                 | Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang                           | Provinsi Kalimantan Timur                         |
| B. Sektor Pelabuhan |                                                                   |                                                   |
| 55.                 | Pelabuhan KEK Maloy                                               | Provinsi Kalimantan Timur                         |
| 56.                 | Pelabuhan Sanur - Nusa Ceningan/Lembongan                         | Provinsi Bali                                     |
| 57.                 | Pelabuhan Likupang                                                | Provinsi Sulawesi Utara                           |
| 58.                 | Makassar <i>New Port</i>                                          | Provinsi Sulawesi Selatan                         |
| 59.                 | Terminal <i>Multipurpose</i> Labuan Bajo                          | Provinsi Nusa Tenggara Timur                      |
| 60.                 | <i>Inland Waterways</i> Cikarang - Bekasi - Laut (CBL)            | Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat      |
| 61.                 | Pembangunan Pelabuhan Patimban                                    | Provinsi Jawa Barat                               |
| 62.                 | Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing                            | Provinsi Kalimantan Barat                         |
| 63.                 | Pengembangan Pelabuhan Kupang                                     | Provinsi Nusa Tenggara Timur                      |
| 64.                 | Pengembangan Pelabuhan Sorong Eksisting dan Arar                  | Provinsi Papua Barat                              |
| 65.                 | Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu                                 | Provinsi Sulawesi Tengah                          |

66. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| NO.                    | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL                                                                                     | LOKASI                                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66.                    | Pengembangan Pelabuhan <i>Hub</i><br>Internasional Kuala Tanjung                                                     | Provinsi Sumatera Utara                                                                  |
| 67.                    | Pengembangan Pelabuhan <i>Hub</i><br>Internasional Bitung                                                            | Provinsi Sulawesi Utara                                                                  |
| C. Sektor Bandar Udara |                                                                                                                      |                                                                                          |
| 68.                    | Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo                                                                           | Provinsi D.I. Yogyakarta                                                                 |
| 69.                    | Bandar Udara Kediri                                                                                                  | Provinsi Jawa Timur                                                                      |
| 70.                    | Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo                                                                                    | Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                             |
| 71.                    | Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya                                                                 | Provinsi Nusa Tenggara Barat                                                             |
| 72.                    | Pengembangan Bandar Udara Adi Soemarmo                                                                               | Provinsi Jawa Tengah                                                                     |
| 73.                    | Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru                                                                                 | Provinsi Papua                                                                           |
| 74.                    | Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak                                                                              | Provinsi Papua Barat                                                                     |
| 75.                    | Pembangunan Bandar Udara Bali Utara                                                                                  | Provinsi Bali                                                                            |
| D. Sektor Kereta       |                                                                                                                      |                                                                                          |
| 76.                    | Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan)                | Provinsi Sulawesi Selatan                                                                |
| 77.                    | Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) | Provinsi Sumatera Utara                                                                  |
| 78.                    | Kereta Api Purukcahu - Batanjung melalui Bangkuang                                                                   | Provinsi Kalimantan Tengah                                                               |
| 79.                    | Kereta Api Rantau Prapat - Duri - Pekanbaru                                                                          | Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau                                                |
| 80.                    | Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo                                                          | Provinsi D.I. Yogyakarta                                                                 |
| 81.                    | Kereta Api Jakarta - Surabaya                                                                                        | Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur |

82. Double . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 6 -

| NO.               | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL                                                                                             | LOKASI                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82.               | <i>Double Track</i> Jawa Selatan                                                                                             | Provinsi Jawa Barat,<br>Provinsi Jawa Tengah,<br>Provinsi D.I. Yogyakarta,<br>dan Provinsi Jawa Timur |
| 83.               | <i>High Speed Railway</i> Jakarta - Bandung                                                                                  | Provinsi DKI Jakarta dan<br>Provinsi Jawa Barat                                                       |
| 84.               | Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi | Provinsi DKI Jakarta dan<br>Provinsi Jawa Barat                                                       |
| 85.               | Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Rel Wilayah Badung - Buleleng                                                       | Provinsi Bali                                                                                         |
| 86.               | Kereta Api Logistik Lahat - Muara Enim - Prabumulih - Tarahan/Lampung dan Prabumulih - Kertapati/Palembang                   | Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung                                                        |
| 87.               | <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)                                                  | Provinsi Sumatera Selatan                                                                             |
| 88.               | <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Jakarta <i>International Stadium</i> - Kelapa Gading dan Velodrome - Manggarai               | Provinsi DKI Jakarta                                                                                  |
| 89.               | Jakarta <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) <i>North - South</i> (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat)                              | Provinsi DKI Jakarta                                                                                  |
| 90.               | <i>Elevated Inner Loop Line</i> Jatinegara - Tanah Abang - Kemayoran                                                         | Provinsi DKI Jakarta                                                                                  |
| E. Sektor Kawasan |                                                                                                                              |                                                                                                       |
| 91.               | Kawasan Industri Kuala Tanjung                                                                                               | Provinsi Sumatera Utara                                                                               |
| 92.               | Kawasan Industri Landak                                                                                                      | Provinsi Kalimantan Barat                                                                             |
| 93.               | Kawasan Industri Ketapang                                                                                                    | Provinsi Kalimantan Barat                                                                             |
| 94.               | Kawasan Industri Tanggamus                                                                                                   | Provinsi Lampung                                                                                      |
| 95.               | Kawasan Industri Jorong                                                                                                      | Provinsi Kalimantan Selatan                                                                           |
| 96.               | Kawasan Industri Bantaeng                                                                                                    | Provinsi Sulawesi Selatan                                                                             |
| 97.               | Kawasan Industri Morowali                                                                                                    | Provinsi Sulawesi Tengah                                                                              |

98. Kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 7 -

| NO.                             | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL            | LOKASI                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 98.                             | Kawasan Industri Konawe                     | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 99.                             | Kawasan Industri Teluk Bintuni              | Provinsi Papua Barat       |
| 100.                            | Kawasan Industri Tanah Kuning               | Provinsi Kalimantan Utara  |
| 101.                            | Kawasan Industri Wilmar Serang              | Provinsi Banten            |
| 102.                            | Kawasan Industri Pulau Obi                  | Provinsi Maluku Utara      |
| 103.                            | Kawasan Industri Weda Bay                   | Provinsi Maluku Utara      |
| 104.                            | Kawasan Industri Takalar                    | Provinsi Sulawesi Selatan  |
| 105.                            | Kawasan Industri Tanjung Enim               | Provinsi Sumatera Selatan  |
| 106.                            | Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-API      | Provinsi Sumatera Selatan  |
| 107.                            | Pembangunan <i>Underground</i> Simpang Lima | Provinsi Jawa Tengah       |
| 108.                            | Kawasan Industri Terpadu Batang             | Provinsi Jawa Tengah       |
| F. Sektor Perumahan             |                                             |                            |
| 109.                            | Pembangunan Rumah Susun                     | Provinsi DKI Jakarta       |
| 110.                            | Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya           | Nasional                   |
| G. Sektor Bendungan dan Irigasi |                                             |                            |
| 111.                            | Bendungan Marangkayu                        | Provinsi Kalimantan Timur  |
| 112.                            | Bendungan Kuningan                          | Provinsi Jawa Barat        |
| 113.                            | Bendungan Bendo                             | Provinsi Jawa Timur        |
| 114.                            | Bendungan Gongseng                          | Provinsi Jawa Timur        |
| 115.                            | Bendungan Tukul                             | Provinsi Jawa Timur        |
| 116.                            | Bendungan Pidekso                           | Provinsi Jawa Tengah       |
| 117.                            | Bendungan Tugu                              | Provinsi Jawa Timur        |
| 118.                            | Bendungan Karalloe                          | Provinsi Sulawesi Selatan  |
| 119.                            | Bendungan Keureuto                          | Provinsi Aceh              |

120. Bendungan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 8 -

| NO.  | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI                       |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 120. | Bendungan Tapin                  | Provinsi Kalimantan Selatan  |
| 121. | Bendungan Passeloreng            | Provinsi Sulawesi Selatan    |
| 122. | Bendungan Lolak                  | Provinsi Sulawesi Utara      |
| 123. | Bendungan Bintang Bano           | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 124. | Bendungan Karian                 | Provinsi Banten              |
| 125. | Bendungan Rukoh                  | Provinsi Aceh                |
| 126. | Bendungan Way Sekampung          | Provinsi Lampung             |
| 127. | Bendungan Kuwil Kawangkoan       | Provinsi Sulawesi Utara      |
| 128. | Bendungan Ladongi                | Provinsi Sulawesi Tenggara   |
| 129. | Bendungan Ciawi                  | Provinsi Jawa Barat          |
| 130. | Bendungan Sukamahi               | Provinsi Jawa Barat          |
| 131. | Bendungan Leuwikeris             | Provinsi Jawa Barat          |
| 132. | Bendungan Cipanas                | Provinsi Jawa Barat          |
| 133. | Bendungan Tiga Dihaji            | Provinsi Sumatera Selatan    |
| 134. | Bendungan Semantok               | Provinsi Jawa Timur          |
| 135. | Bendungan Pamukkulu              | Provinsi Sulawesi Selatan    |
| 136. | Bendungan Bener                  | Provinsi Jawa Tengah         |
| 137. | Bendungan Sadawarna              | Provinsi Jawa Barat          |
| 138. | Bendungan Tiro                   | Provinsi Aceh                |
| 139. | Bendungan Lausimeme              | Provinsi Sumatera Utara      |
| 140. | Bendungan Sidan                  | Provinsi Bali                |
| 141. | Bendungan Marga Tiga             | Provinsi Lampung             |
| 142. | Bendungan Bagong                 | Provinsi Jawa Timur          |
| 143. | Bendungan Randugunting           | Provinsi Jawa Tengah         |
| 144. | Bendungan Mbay                   | Provinsi Nusa Tenggara Timur |

145. Bendungan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

| NO.  | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL                                | LOKASI                       |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 145. | Bendungan Bulango Ulu                                           | Provinsi Gorontalo           |
| 146. | Bendungan Napungete                                             | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 147. | Bendungan Temef                                                 | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 148. | Bendungan Way Apu                                               | Provinsi Maluku              |
| 149. | Bendungan Meninting                                             | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 150. | Bendungan Tamblang                                              | Provinsi Bali                |
| 151. | Bendungan Beringin Sila                                         | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 152. | Bendungan Tiu Suntuk                                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 153. | Bendungan Manikin                                               | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 154. | Bendungan Jlantah                                               | Provinsi Jawa Tengah         |
| 155. | Bendungan Jragung                                               | Provinsi Jawa Tengah         |
| 156. | Bendungan Sepaku Semoi                                          | Provinsi Kalimantan Timur    |
| 157. | Bendungan Budong-Budong                                         | Provinsi Sulawesi Barat      |
| 158. | Bendungan Ameroro                                               | Provinsi Sulawesi Tenggara   |
| 159. | Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci           | Provinsi Aceh                |
| 160. | Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan     | Provinsi Aceh                |
| 161. | Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang            | Provinsi Sumatera Selatan    |
| 162. | Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase | Provinsi Sulawesi Selatan    |
| 163. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa            | Provinsi Sulawesi Tengah     |

164. Rehabilitasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| NO.                               | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL                                                                        | LOKASI                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 164.                              | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang                                                    | Provinsi Jawa Barat                      |
| 165.                              | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan                                                     | Provinsi Jawa Tengah                     |
| 166.                              | Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Telake                                                 | Provinsi Kalimantan Timur                |
| 167.                              | Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lempuing                                                    | Provinsi Sumatera Selatan                |
| H. Sektor Air Bersih dan Sanitasi |                                                                                                         |                                          |
| 168.                              | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat                                                       | Provinsi Jawa Tengah                     |
| 169.                              | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede                                                    | Provinsi Jawa Barat                      |
| 170.                              | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan                                                              | Provinsi Jawa Timur                      |
| 171.                              | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung                                                  | Provinsi Lampung                         |
| 172.                              | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur                                                   | Provinsi Jawa Barat                      |
| 173.                              | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wasusokas                                                   | Provinsi Jawa Tengah                     |
| 174.                              | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong                                              | Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta |
| 175.                              | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro (Bantul, Kulon Progo)                              | Provinsi D.I. Yogyakarta                 |
| 176.                              | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng-Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma) | Provinsi Bengkulu                        |
| 177.                              | Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan                                                              | Provinsi Bali                            |
| 178.                              | Sarana dan Prasarana Air Baku Karian                                                                    | Provinsi Banten                          |
| 179.                              | Jakarta <i>Sewerage System</i> (JSS)                                                                    | Provinsi DKI Jakarta                     |

I. Sektor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

| NO.                      | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL                                                                                                                    | LOKASI                                                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Sektor Tanggul Pantai |                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |
| 180.                     | Tanggul Pantai                                                                                                                                      | Provinsi DKI Jakarta,<br>Provinsi Jawa Barat, dan<br>Provinsi Banten                                                  |
| J. Sektor Energi         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |
| 181.                     | Kilang Minyak Bontang                                                                                                                               | Provinsi Kalimantan Timur                                                                                             |
| 182.                     | Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)                                                                                                                      | Provinsi Jawa Timur                                                                                                   |
| 183.                     | Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM                                                                                                                   | Indonesia Bagian Timur                                                                                                |
| 184.                     | Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG                                                                                                                   | Indonesia Bagian Timur                                                                                                |
| 185.                     | <i>Upgrading</i> Kilang-Kilang Eksisting/ <i>Refinery Development Master Plan</i> (RDMP)                                                            | Provinsi Jawa Tengah,<br>Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan<br>Provinsi Sumatera Selatan                   |
| 186.                     | <i>Upgrading</i> Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan                                                                           | Provinsi Jawa Barat                                                                                                   |
| 187.                     | Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela                                                                                                    | Provinsi Maluku                                                                                                       |
| 188.                     | Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka ( <i>Indonesia Deepwater Development Project/IDD</i> )                              | Provinsi Kalimantan Timur                                                                                             |
| 189.                     | Proyek Tangguh LNG <i>Train 3</i>                                                                                                                   | Provinsi Papua Barat                                                                                                  |
| 190.                     | Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru                                                                                           | Provinsi Jawa Timur                                                                                                   |
| 191.                     | Pembangunan Jaringan Gas Kota                                                                                                                       | Nasional                                                                                                              |
| 192.                     | Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Cirebon – Semarang, Ruas KEK Sei Mangkei – Dumai, dan Ruas <i>West Natuna Transportation System</i> – Pemping) | Provinsi Jawa Barat –<br>Provinsi Jawa Tengah,<br>Provinsi Sumatera Utara –<br>Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau |
| 193.                     | Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim                                                                                                                | Provinsi Sumatera Selatan                                                                                             |

194. Pembangunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

| NO.                  | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL                                                                                                                                                                               | LOKASI                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 194.                 | Pembangunan Fasilitas <i>Coal to Methanol</i> di Kutai Timur                                                                                                                                                   | Provinsi Kalimantan Timur                                                |
| 195.                 | Pembangunan Bahan Bakar Hijau ( <i>Green Diesel Bio Refinery Revamping</i> RU IV Cilacap, RU III Plaju <i>Green Refinery</i> , Hidrogenasi CPO PT. Pusri Palembang, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek) | Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Barat |
| K. Sektor Teknologi  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
| 196.                 | Percepatan Pembangunan <i>Technopark</i>                                                                                                                                                                       | Nasional                                                                 |
| 197.                 | Proyek Satelit Multifungsi                                                                                                                                                                                     | Orbit                                                                    |
| 198.                 | Pengembangan Drone <i>Male</i> Kombat ( <i>Male Unmanned Combat Aerial Vehicle</i> )                                                                                                                           | Nasional                                                                 |
| 199.                 | Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat                                                                                          | Nasional                                                                 |
| 200.                 | Pengembangan Industri Garam                                                                                                                                                                                    | Nasional                                                                 |
| L. Sektor Pendidikan |                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
| 201.                 | Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia                                                                                                                                                   | Provinsi Jawa Barat                                                      |

II. PROGRAM

| NO. | DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) (daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan) |
| 2.  | Program Pemerataan Ekonomi                                                                                                                                               |
| 3.  | Program Pengembangan Kawasan Perbatasan                                                                                                                                  |
| 4.  | Program Pengembangan Jalan Akses <i>Exit Toll</i>                                                                                                                        |
| 5.  | Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)                                                                                                        |

6. Program . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

|     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) (daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan) |
| 7.  | Program Pembangunan <i>Smelter</i>                                                                                                                                                                                                              |
| 8.  | Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional ( <i>Food Estate</i> )                                                                                                                                                                           |
| 9.  | Program Pengembangan <i>Superhub</i>                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan                                                                                                                |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



dia Silvanna Djaman